

ANALISIS PERAN PEMANGKU ADAT SEBAGAI *BEST PRACTICE* DALAM MENDORONG LITERASI POLITIK MASYARAKAT DI KOTA SOLOK

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas



Oleh:

DIFA GHASSANI

BP. 2420831001

Pembimbing:

1. Dr. Tengku Rika Valentina, MA

2. Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2026

ABSTRAK

Nama : Difa Ghassani

Program Studi : Magister Ilmu Politik

Judul : Analisis Peran Pemangku Adat Sebagai Best Practice Dalam Mendorong Literasi Politik Masyarakat Di Kota Solok

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat literasi politik masyarakat yang masih menjadi tantangan dalam mendorong kualitas demokrasi di tingkat lokal. Di Kota Solok, peran pemangku adat seperti LKAAM dan Bundo Kandung memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga dapat dijadikan mitra strategis oleh KPU Kota Solok dalam menyampaikan informasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemangku adat sebagai *best practice* dalam mendorong literasi politik masyarakat, dengan mengkaji secara khusus keterlibatan LKAAM, Bundo Kandung, serta KPU Kota Solok. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teori peran Khan dan Katz (indikator kejelasan peran, perilaku peran, dan ekspektasi peran) serta teori jaringan sosial James Coleman (indikator modal sosial berupa kepercayaan dan struktur jaringan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku adat berperan dalam mendorong literasi politik masyarakat melalui kolaborasi dengan KPU Kota Solok. Kejelasan peran terlihat dari pembagian fungsi masing-masing aktor, perilaku peran terefleksikan dalam tindakan nyata sosialisasi politik, dan ekspektasi peran tampak dari harapan masyarakat agar pemangku adat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Dari perspektif jaringan sosial, modal sosial berupa kepercayaan masyarakat kepada pemangku adat serta struktur jaringan yang menghubungkan KPU dengan masyarakat melalui pemangku adat memperlihatkan efektivitas penyebaran informasi politik. Kolaborasi KPU, LKAAM, dan Bundo Kandung dapat dikategorikan sebagai *best practice* dalam upaya mendorong literasi politik masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi lokal berbasis nilai adat dan budaya.

Kata kunci : Peran, Pemangku Adat, Literasi Politik, *Best Practice*, KPU Kota Solok

ABSTRACT**Nama : Difa Ghassani****Program Studi : Magister Ilmu Politik****Judul : *Analysis of the Role of Traditional Stakeholders as Best Practice in Encouraging Political Literacy in the Community in Solok City***

This research is motivated by the low level of political literacy of society which is still a challenge in improving the quality of democracy at the local level. In Solok City, the role of traditional stakeholders such as LKAAM and Bundo Kanduang has an influence in the social life of the community, so that it can be used as a strategic partner by the Solok City KPU in conveying political information. This study aims to analyze the role of customary stakeholders as best practice in increasing community political literacy, by specifically studying the involvement of LKAAM, Bundo Kanduang, and the Solok City KPU. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data was collected through interviews and documentation, then analyzed with the roles theory of KHAN and KATZ (indicators of role clarity, role behavior, and role expectations) as well as James Coleman's social network theory (social capital indicators in the form of trust and network structure). The results showed that customary stakeholders played a role in increasing the political literacy of the community through collaboration with the Solok City KPU. The clarity of the role can be seen from the division of functions of each actor, the behavior of the role is reflected in the concrete action of political socialization, and the expectations of the role can be seen from the expectations of the community so that customary stakeholders become a bridge between the government and the community. From the perspective of social networks, social capital in the form of public trust in customary stakeholders and network structures that connect the KPU with the community through customary stakeholders show the effectiveness of the dissemination of political information. The collaboration of KPU, LKAAM, and Bundo Kanduang can be categorized as best practices in an effort to improve the political literacy of society, while strengthening the quality of local democracy based on customary and cultural values.

Keywords: Roles, Customary Stakeholders, Political Literacy, Best Practice, KPU of Solok City